

ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN  
DETEKSI ILUSI FISKAL  
(STUDI KASUS PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2005-2008)

Bahrul Ulum Rusydi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkassar  
Jalan HM Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa.  
Email: bahrul.rusydi@yahoo.com

**Abstract** Regional financial capacity and performance is one of the measurements that can be used to see how the capacity of the region to run the regional autonomy. There are two regional financial dimensions which are revenue side and expenditure side. The revenue side is reflected by PAD meanwhile the expenditure side is depicted by regional expenditure. This study aims to analyze the regional financial determinant of the government in regional autonomy and to detect fiscal illusion in provincial government in Indonesia. Regional financial determinant analysis is used by utilizing simultaneous equation where the simultaneous relationship is shown by interplay relationship between PAD and provincial expenditure. Fiscal illusion detection method provides revenue enhancement. The sample of this research covers all province in Indonesia from 2005 to 2008. The result of this study shows that there is significant relationship between PAD and regional expenditure. PAD is able to increase the regional expenditure 0,67 million rupiah every 1 million PAD increase, whereas the regional expenditure can improve PAD 0,07 million rupiah every 1 million regional expenditure increase. In addition, this study also found that there was no fiscal illusion in provincial financial performance.

**Abstrak**, Kemampuan keuangan daerah dan kinerja adalah salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kapasitas daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Ada dua dimensi keuangan daerah yang sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi pendapatan tercermin PAD sementara sisi pengeluaran digambarkan oleh belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan keuangan daerah dari pemerintah dalam otonomi daerah dan untuk mendeteksi ilusi fiskal di pemerintah provinsi di Indonesia. Analisis determinan keuangan daerah digunakan dengan memanfaatkan persamaan simultan di mana hubungan simultan ditunjukkan oleh hubungan interaksi antara PAD dan pengeluaran provinsi. Metode deteksi ilusi fiskal memberikan peningkatan pendapatan. Sampel penelitian ini mencakup semua provinsi di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara PAD dan belanja daerah. PAD mampu meningkatkan belanja daerah 0,67 juta rupiah setiap kenaikan 1 juta PAD, sedangkan belanja daerah dapat meningkatkan PAD 0,07 juta rupiah setiap 1 juta kenaikan belanja daerah. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa tidak ada ilusi fiskal dalam kinerja keuangan provinsi.

**Kata Kunci:** Kinerja Fiskal, Ilusi Fiskal, Otonomi, Desentralisasi

## PENDAHULUAN

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu telah merambah ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu aspek reformasi yang dominan

adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud adalah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Isu yang paling mencuat dalam aspek ini adalah otonomi yang lebih luas dan nyata kepada daerah. Sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan tuntutan daerah yang sudah lama digemakan sekaligus sebagai langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Priyo, 2006). Desentralisasi dimaknai dalam tiga aspek. Pertama sebagai pelepasan tanggung jawab pusat kepada daerah, secara langsung dimaknai sebagai pelepasan daerah sebagai pelaksana dan pengambil keputusan administrasi dengan bimbingan teknis oleh pusat. Kedua sebagai delegasi yang berkaitan dengan situasi dimana daerah bertindak atas nama pemerintah pusat. Ketiga sebagai devolusi dimana pelimpahan kewenangan untuk memutuskan sesuatu di daerah.

Menilik pada konteks desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, konsekuensinya adalah adanya alokasi penyediaan barang publik pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Selain itu, juga akan mempengaruhi tanggung jawab dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations*). Hubungan keuangan antar pemerintah merujuk pada hubungan keuangan antara berbagai tingkatan pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan negara dan pola pengeluarannya termasuk kekuasaan. Mulai dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi terhadap tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Handayani, 2009).

Implikasi langsungnya adalah meningkatnya pendanaan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Sebelum era otonomi dan desentralisasi, pendanaan utama pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat dan PAD dengan pajak dan retribusi sebagai instrumen utama penerimaan daerah. Situasi ini menjadi semakin kompleks mengingat kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan berbagai keanekaragamannya, sehingga potensi kesenjangan keuangan antar daerah (horizontal) semakin besar. Potensi daerah baik berupa sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) tidak tersebar secara merata pada tiap-tiap daerah otonom. Permasalahan horizontal (antar pemerintah daerah) kemudian muncul dalam hal upaya mengumpulkan sumber pendanaan untuk biaya pembangunan. Pemerintah pusat berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini dengan mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian dana perimbangan ini ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan horizontal (antar

pemerintah daerah), sekaligus untuk membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunannya.

Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2001). Struktur keuangan daerah tercermin dalam 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan adalah PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah sedangkan sisi pengeluaran adalah belanja daerah.

Tabel 1  
Dana Perimbangan dan PAD Provinsi  
Tahun 2005-2008 (dalam Juta Rupiah)

TAHUN	DANA PERIMBANGAN				PAD
	DAU	DBH	DAK	TOTAL	
2005	9.223.416	15.391.639	3.994.000	28.609.055	27.885.741
2006	14.682.400	13.973.765	11.559.800	40.215.965	29.204.017
2007	16.578.797	18.329.266	17.094.100	52.002.163	35.177.065
2008	17.951.410	27.566.463	20.439.635	65.957.508	44.515.454

Sumber: BPS, 2014 (diolah)

Dana perimbangan dan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi besar kepada anggaran penerimaan. Pada tahun 2005, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebesar 28,61 trilyun rupiah. Sampai pada tahun 2008, terlihat bahwa dana perimbangan yang diterima provinsi membengkak hingga mencapai 65,96 trilyun rupiah. Bila dibandingkan dengan PAD yang walaupun mengalami peningkatan, sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada provinsi sebagai dana bantuan (*grant*).

Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Menurut Fischer (1996) *intergovernmental transfer* yang disebut juga sebagai dana transfer pemerintah pusat ke daerah ini juga merupakan sumber penerimaan yang dominan bagi pemerintah daerah di banyak negara, seperti Amerika Serikat, negara-negara Afrika, Nigeria, dan Meksiko. Amerika sebagai negara maju memiliki persentase dana transfer mencapai 50 persen dari total pendapatan negara federalnya dan 60 persen pada pemerintah daerah (dalam Handayani, 2009). Sementara di negara-negara lain, persentase dana transfer atas pengeluaran pemerintah daerah adalah 85 persen di Afrika Selatan, 67-95 persen di Nigeria, dan 70-90 persen di Meksiko. Indonesia sendiri memiliki proporsi dana transfer sekitar 80 persen dari total pengeluaran (Simanjuntak dalam Handayani, 2009).

Tabel 2  
Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Provinsi  
Tahun 2005-2008 (dalam persen)

TAHUN	Dana Perimbangan	BELANJA	$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Belanja Daerah}}$
2005	28.609.055	56.769.806	50,39
2006	40.215.965	67.098.160	59,94
2007	52.002.163	71.772.659	72,45
2008	65.957.508	80.763.559	81,67

Sumber: BPS, 2014 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi ratio dana perimbangan terhadap belanja daerah provinsi dengan kecenderungan pada tren yang meningkat. Melihat data bahwa sebagian besar daerah memiliki rasio antara 50-81 persen terhadap belanja daerahnya, hal ini berarti belanja daerah provinsi dibiayai oleh 50-81 persen dari dana dana perimbangan. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa daerah masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat.

Tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat, sekaligus menjadi tekanan dalam pengumpulan PAD di provinsi. Optimalnya, dana perimbangan yang diperoleh daerah dialokasikan untuk belanja daerah yang kemudian akan meningkatkan PAD. Realitas menunjukkan hal yang sebaliknya, daerah cenderung mengabaikan penggalian PAD sebagai basis utama penerimaan daerah dengan menjadikan dana perimbangan sebagai substitusinya.

Tabel 3  
Belanja Daerah Provinsi Tahun 2005-2008  
(dalam Juta Rupiah)

TAHUN	BELANJA DAERAH	PERSENTASE
2005	56.769.806	-
2006	67.098.160	18,19
2007	71.772.659	6,97
2008	80.763.559	12,53

Sumber: BPS, 2014 (diolah)

Perkembangan belanja daerah provinsi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara nominal, tetapi dengan persentase yang menurun. Tahun 2005 belanja daerah adalah 56,77 trilyun rupiah kemudian menjadi 67,09 trilyun pada tahun 2006, meningkat sebesar 18,19 persen. Sayangnya pada tahun-tahun berikutnya pengeluaran mengalami trend yang fluktuatif walaupun jumlah nominalnya meningkat.

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007) serta Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan bahwa

tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada DAU daripada mengupayakan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Alderete (dalam Priyo, 2006) menegaskan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer (dalam bentuk dana perimbangan) kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, muncul spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris. Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) dan Priyo (2009) diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Setiap penerimaan pemerintah memiliki pengaruh terhadap besarnya pengeluaran daerah, dimana pada akhirnya belanja daerah akan berdampak pada penerimaan daerah (seperti pajak dan retribusi).

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka diduga terjadi perilaku asimetris pemerintah daerah dalam merespon dana perimbangan pemerintah pusat. Perilaku asimetris pemerintah daerah dapat mempengaruhi pola belanja daerah dan pengumpulan pendapatan daerah dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh determinan kinerja keuangan daerah serta deteksi ilusi fiskal pada anggaran pemerintah daerah.

## TINJAUAN TEORETIK

### TEORI PRODUKSI

Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input, sedangkan jumlah produksi selalu disebut sebagai output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu

$$Q = f(K, L)$$

Dimana, Q adalah output, K adalah kapital (modal), dan L adalah tenaga kerja (labor). Persamaan tersebut merupakan gambaran sederhana dan bersifat umum mengenai keterkaitan antar faktor-faktor produksi dan jumlah produksi. Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal dan jumlah tenaga kerja.

Pemerintah dalam rangka penyediaan barang publik kepada masyarakat, bertindak mengikuti fungsi produksi tersebut di atas. Hal ini disebabkan karena pemerintah melakukan apa yang disebut dengan belanja daerah autonom (*autonomous government expenditure*). Belanja daerah yang autonom, merupakan belanja daerah yang harus dilakukan walaupun daerah tidak memiliki pendapatan. Asumsikan bahwa belanja daerah adalah fungsi dari output, dimana output dalam konteks ini adalah PDRB. Secara matematis dituliskan:

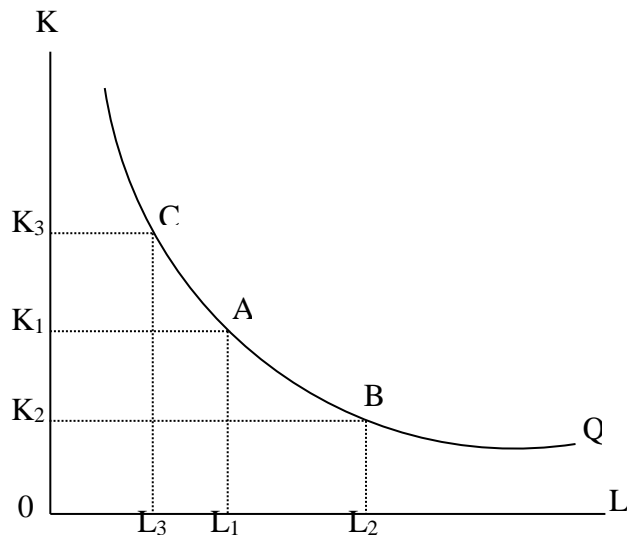
$$G = f(PDRB)$$

Selanjutnya untuk menghasilkan PDRB, pemerintah akan membutuhkan input. Sehingga pemerintah melakukan belanja daerah, asumsikan belanja daerah terdiri atas 2, yaitu belanja modal dan belanja pegawai, sehingga fungsinya akan menjadi:

$$PDRB = f(K, L)$$

Berdasarkan pada fungsi di atas, dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan PDRB dalam jumlah tertentu diperlukan kombinasi input-input dalam jumlah yang tertentu pula. Kombinasi input-input dalam suatu proses produksi dapat digambarkan dalam sebuah kurva isokuan.

Gambar 1  
Kurva Isokuan



Kurva isokuan memperlihatkan kombinasi input-input yang digunakan untuk memproduksi sejumlah output. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pemerintah akan menentukan kombinasi input-input tersebut dengan menyesuaikan pada anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan.

Belanja daerah berupa penggunaan input modal maupun tenaga kerja dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi. Pajak dan retribusi daerah yang digunakan merupakan akumulasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Belanja daerah tahun  $t$  dibiayai oleh pajak dan retribusi tahun  $t-1$ , sehingga terdapat *lag* waktu didalam sistem hubungannya. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$BD_t = f(\text{Pajak}_{t-1}, \text{Retribusi}_{t-1})$$

Oleh karena pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan utama daerah yang paling besar, maka fungsi belanja daerah menjadi:

$$BD_t = f(\text{PAD}_{t-1})$$

Diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdampak pada adanya dana transfer yang diperoleh daerah sebagai sumber penerimaan. Dimana, dana transfer yang diterima pada tahun  $t$  dibelanjakan untuk belanja daerah pada tahun  $t+1$ . Sehingga fungsi belanja daerah menjadi:

$$BD_t = f(\text{PAD}_{t-1}, \text{Dana Transfer}_{t-1})$$

## FENOMENA ILUSI FISKAL

Menurut khasanah ekonomi, telaah mengenai *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model *ilusi fiskal* mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya (Kuncoro, 2007).

Oates (dalam Kuncoro, 2007) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah.

Lebih jauh, ilusi fiskal diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran dan keputusan mengenai kedua hal tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini (Schawallie, 1989). Logan (1986) berpendapat kesalahan persepsi tersebut dapat berlanjut dalam bahkan jangka panjang. Turnbull (1992) menawarkan penjelasan lain mengenai keberlanjutan kesalahan persepsi tersebut. Menurut Turnbull, ketidakpastian tingkat harga barang publik akan menciptakan risiko. Risiko ini dalam jangka panjang akan memicu pengeluaran yang berlebih (dalam Priyo, 2009)

Fillimon, Romer, dan Rosenthal (1982) mengembangkan hipotesis ilusi fiskal dalam konteks ketidaktahuan masyarakat akan jumlah transfer yang diterima. Dalam kasus ini, pemerintah daerah menyembunyikan jumlah transfer yang diterima dari pusat dan kemudian membelanjakannya pada level puncak. Akibatnya, masyarakat memandang telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah daerah dengan kenaikan yang lebih tinggi daripada kenaikan kuantitas yang diminta sebagai cerminan dari kenaikan pendapatannya (dalam Priyo, 2009).

## KINERJA KEUANGAN DAERAH

John Witmore dalam *Coaching for Performance* (1997) menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam

organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga.

Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004). Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terikat satu sama lain. Ketiga aspek tersebut meliputi (Simanjuntak dalam Halim, 2001):

1. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.
3. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun sekarang dan kecenderungannya pada tahun-tahun mendatang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Dilihat dari sisi pengeluaran, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu membelanjakan pendapatan yang diterima untuk selanjutnya memberikan timbal balik atas pengeluaran tersebut. Timbal balik dalam hal ini seperti pendapatan pajak dan retribusi. Analisis sisi pendapatan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai titik sentral analisisnya, sedangkan analisis sisi pengeluaran menekankan pada belanja daerah sebagai titik setral analisisnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini terbagi menjadi 2 penelitian, yaitu penelitian mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah dan penelitian mengenai deteksi ilusi fiskal. Penelitian mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan sistem persamaan simultan yang terdiri atas 2 persamaan struktural. Persamaan struktural pertama menggunakan belanja daerah (BD) sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah DAU, DBH, dan PAD. Persamaan struktural kedua menggunakan PAD sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah DAU, belanja daerah (BD), dan daya pajak (DP).



Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui pendekatan pendapatan (*revenue enchancement*). Pendekatan pendapatan mengasumsikan bahwa belanja daerah berhubungan positif dengan penerimaan daerah, karena belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya mempunyai hubungan positif dengan belanja, namun bila terjadi hal yang sebaliknya maka diindikasikan terjadi ilusi fiskal (Priyo, 2009).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS DETERMINAN KINERJA FISKAL

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan menggunakan model ekonometrika berdasarkan pada pengembangan teori sebagai berikut:

*Persamaan Struktural 1:*

$$BD_t = \beta_0 + \beta_1 DAU_{t-1} + \beta_2 DBH_{t-1} + \beta_3 PAD_{t-1} + e_{1t} \quad (1)$$

*Persamaan Struktural 2:*

$$PAD_t = \beta_4 + \beta_5 DAU_{t-1} + \beta_6 DP_{t-1} + \beta_7 BD_{t-1} + e_{2t} \quad (2)$$

Dalam menganalisis kedua model yang telah disusun, digunakan metode persamaan simultan karena terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel endogen secara simultan. Untuk dapat diregres secara simultan, maka harus dibentuk *reduced-form* dari kedua model yang digunakan. Bentuk *reduced-form* adalah sebagai berikut :

*Reduced Form 1*

$$BD_{it} = \Pi_0 + \Pi_1 DBH_{it-1} + \Pi_2 DAU_{it-1} + \Pi_3 DP_{it-1} + \mu_1 \quad (3)$$

*Reduced Form 2*

$$PAD_{it} = \Pi_4 + \Pi_5 DBH_{it-1} + \Pi_6 DAU_{it-1} + \Pi_7 DP_{it-1} + \mu_2 \quad (4)$$

Hasil identifikasi *order-condition* persamaan struktural 1 dan 2 diperoleh hasil bahwa persamaan bersifat *exactly identified* sehingga dapat diselesaikan dengan menggunakan ILS maupun TSLS. Penyelesaian persamaan simultan dalam penelitian ini menggunakan TSLS.

Regresi persamaan struktural 1 menunjukkan tidak terdapatnya masalah dalam pengujian asumsi klasik. Uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Park menghasilkan nilai t-statistik dimana sebagian besar variabel independen tidak signifikan secara statistik. Taraf signifikan yang digunakan adalah  $\alpha=5\%$ , sehingga model bebas dari heterokedastisitas. Uji autokolerasi menggunakan uji Durbin Watson, dimana nilai Durbin Watson regresi adalah 1,921. Nilai D-W hitung berada di wilayah tidak ada autokorelasi sehingga model bebas dari autokorelasi.

Tabel 4  
 Hasil Regresi Persamaan Struktural 1  
 (Dependen Variabel = BD)

Independen Variabel	Coeficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.	Keterangan
DAU_T1	3,156084	1,356658	2,326367	0,0222	Signifikan
DBH_T1	1,625063	0,473051	3,435281	0,0009	Signifikan
PAD_F	0,639647	0,362125	1,766368	0,0806	Tidak Signifikan
D2	-600279,5	231371,2	-2,594443	0,0110	Signifikan
D3	-966800,3	242038,8	-3,994402	0,0001	Signifikan
C	-36231,95	387723,8	-0,093448	0,9257	Tidak Signifikan

Signifikansi pada  $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hasil regresi, jika DAU mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah, maka nilai belanja daerah akan bertambah sebesar 3,16 juta rupiah. Hasil regresi juga menunjukkan hubungan DAU terhadap belanja daerah dalam hubungan yang positif. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika DAU meningkat, maka belanja daerah juga meningkat.

Hasil regresi menunjukkan bahwa DBH berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu, hasil regresi juga memperlihatkan hubungan positif antara DBH dengan belanja daerah. Peningkatan DBH sebesar 1 juta rupiah akan menambah belanja daerah sebesar 1,63 juta rupiah.

Hasil regresi menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Tidak signifikannya PAD dalam mempengaruhi belanja daerah disebabkan karena rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah dibandingkan dengan DAU dan DBH. Tingginya proporsi dana perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah yang mencapai 80 persen dari total penerimaan (Simanjuntak dalam Handayani, 2009) mengakibatkan PAD hanya berkontribusi sangat kecil.

Hasil regresi persamaan struktural 2 menunjukkan tidak terdapatnya masalah dalam pengujian asumsi klasik. Uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Park menghasilkan nilai t-statistik dengan sebagian besar variabel independen tidak signifikan secara statistik. Taraf signifikan yang digunakan adalah  $\alpha=5\%$ , sehingga model bebas dari heterokedastisitas. Uji autokolerasi menggunakan uji Durbin Watson, dimana nilai Durbin Watson regresi adalah 1,83. Nilai D-W hitung berada di wilayah tidak ada autokorelasi sehingga model bebas dari autokorelasi.

Tabel 5  
Hasil Regresi Persamaan Struktural 2  
(Dependen Variabel = PAD)

Independen Variabel	Coeficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.	Keterangan
DAU_T1	1,376925	0,510004	2,699833	0,0082	Signifikan
DP_T1	43229,03	29087,17	1,486189	0,1406	Tidak signifikan
BD_F	0,527509	0,031895	16,53904	0,0000	Signifikan
D2	-335854,1	221975,6	-1,513023	0,1337	Tidak signifikan
D3	-464039,0	232171,7	-1,998689	0,0486	Signifikan
C	-465562,5	197164,8	-2,361286	0,0203	Signifikan

Signifikansi pada  $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 2, dijelaskan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa belanja daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,53 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD.

Hasil regresi juga memperlihatkan hubungan antara DAU dengan PAD dalam hubungan yang signifikan secara statistik. Berdasarkan pada hasil regresi, peningkatan 1 juta DAU<sub>t-1</sub> akan menambah PAD<sub>t</sub> sebesar 1,38 juta rupiah. Selain itu, juga diperoleh hasil bahwa daya pajak tidak berpengaruh terhadap PAD.

### DETEKSI ILUSI FISKAL

Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui pendekatan pendapatan (*revenue enhancement*). Persamaan regresi di dalam pengukuran pendekatan pendapatan (*revenue enhancement*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln BD_t = \ln PDRB_{t-1} + \ln TAX_{t-1} + \ln HCT_{t-1} + \ln DAU_{t-1} + \ln DBH_{t-1} + \mu \quad (5)$$

Berdasarkan hasil regresi linear berganda di atas, maka dapat ditarik beberapa pernyataan yang diperlihatkan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6  
Deteksi Ilusi Fiskal

Variabel	Coefficient	Prob.	Keterangan	Kesimpulan
PDRB	-0,069652	0,0458	Signifikan	Terjadi ilusi fiskal
TAX	0,197354	0,0000	Signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
HCT	0,015549	0,2235	Tidak signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
DAU	0,273853	0,0000	Signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
DBH	0,398601	0,0000	Signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
C	4,683182	0,0000	Varibel Dependen (BD)	

Signifikansi pada  $\alpha = 5\%$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, serta DBH memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan PDRB memiliki hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena terdapat variabel pendapatan yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik 4 kesimpulan utama. *Pertama*, ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien DAU dan DBH dalam mempengaruhi belanja daerah yang sangat tinggi dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini mengindikasikan belum berhasilnya otonomi daerah di tingkat provinsi. *Kedua*, eksplorasi sumber daya ekonomi di tingkat daerah belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari fluktuatif dan tidak berpengaruhnya daya pajak (tax effort) terhadap PAD. *Ketiga*, akibat eksplorasi sumber penerimaan daerah yang kurang optimal, mengakibatkan kontribusi PAD terhadap belanja daerah sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. *Keempat*, terdapat fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Munculnya ilusi fiskal menandakan bahwa pemerintah daerah provinsi belum mengalokasikan sumber pendapatannya (termasuk dana perimbangan) secara efisien.

Adapun saran-saran masukan dari penelitian pada skripsi ini antara lain: *Pertama*, tidak berpengaruhnya PAD terhadap belanja daerah disebabkan oleh kecilnya kontribusi PAD di dalam penerimaan daerah. Untuk meningkatkan kontribusi PAD, dapat ditempuh dengan cara meningkatkan daya pajak, karena penyebab utama rendahnya kontribusi PAD pada penerimaan daerah adalah kemalasan menggali potensi daerah. *Kedua*, masih rendahnya koefisien DBH sebagai komponen penerimaan dapat ditingkatkan melalui penggalan potensi pajak pusat di daerah dengan lebih giat. *Ketiga*, masih rendahnya kontribusi belanja daerah terhadap PAD dapat dilakukan dengan menambah belanja modal. Karena belanja modal dapat menciptakan basis pajak yang baru sebagai sumber penerimaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Atiah Handayani. 2009. "Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah (Studi Kasus:

- Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).” *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Indonesia. Berbagai edisi penerbitan, BPS Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ Ringkasan APBD Provinsi. Berbagai edisi penerbitan, BPS Jawa Tengah.
- Bagir Manan,. 1994. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bernardo Gatot Tri Bawono. 2008. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah.” *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Dwirandra. 2008. “Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006.” *Jurnal Ilmiah*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Emelia, 2006. “Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Firmansyah. 2006. *Modul Panel Data Regression Aplikasi dengan Eviews 4.0*. Semarang: LSKE
- Firmansyah. 2008. *Modul Praktek Ekonomika Dasar: Estimasi, Asumsi Klasik dan Variabel Dummy Aplikasi Eviews 4.0*. Semarang: LSKE
- Gideon Tri Budi Susilo dan Priyo Hari Adi. 2007. “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)” *Paper disajikan pada Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*. Surabaya.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric*. The McGrow Hill Companies Inc. New York.
- Guritno Mangkoesobroto,. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/>
- Laras Wulan Ndadari dan Priyo Hari Adi. 2008. “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat.” *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Kesit Bambang Prakosa. 2004. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY.” *JAAI*, Vol 08 No.2
- Miyasto, 2009. Bahan Kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Muhammad Iqbal Lubekran. 2007. “Analisa Dampak Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Perkembangan Daerah di Indonesia Periode 2001-2004.”

- Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mutiara Maimunah. 2006. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Nagathan, dan KJ Sivagnanan. 1999. "Federal Transfer and Tax Effort of States in India." *Indian Economic Journal*.
- Priyo Hari Adi. 2006. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali)." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Priyo Hari Adi. 2007. "Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi." *The 1st National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- 
- \_\_\_\_\_ 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.1.
- Purbayu Budi Santosa. 2005. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri." *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.2, No.1, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sri Anggita Nur Prasetya. 2009. "Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Manufaktur di Indonesia Tahun 2000-2003: Pendekatan Model Persamaan Simultan." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang
- Syukriy Abdullah & Abdul Halim. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI Yogyakarta*
- Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi, 2007, "Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanuddin, Makassar.